

PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN (MBDK) YANG BERPOTENSI MENINGKATKAN PREVALENSI PTM: DIABETES MELITUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

INTISARI

Tasya Amanda¹ dan Nailul Amany²

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di DIY. Penelitian hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemangku kepentingan dalam menekan prevalensi PTM diabetes melitus di DIY kaitannya dengan konsumsi MBDK.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Bahan penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara menggunakan pedoman pertanyaan terbuka dan penyebaran kuesioner dengan menggunakan ‘google formulir’ yang disebarluaskan secara daring melalui media sosial. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu: **Pertama**, perlindungan hukum terhadap konsumen MBDK belum diatur secara jelas dan tegas dalam suatu aturan tertentu. Pelindungan hukum preventif dan represif terhadap MBDK terkandung secara implisit pada beberapa aturan terkait pangan olahan. Pelindungan hukum bagi konsumen MBDK belum memenuhi asas-asas pelindungan konsumen. Kepastian hukum dan pelindungan konsumen MBDK adalah kewajiban pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. **Kedua**, upaya penekanan prevalensi diabetes melitus di DIY kaitannya dengan konsumsi MBDK belum ada pengaturannya sehingga upaya yang dilakukan masih merupakan bentuk penanggulangan diabetes secara umum. Terdapat kebijakan “Gendhis Manis” dan “CERDIK” dalam upaya penanggulangan diabetes di DIY. Upaya-upaya yang dilakukan tidak secara spesifik berkaitan dengan permasalahan MBDK. Melihat kebijakan terkait MBDK yang telah diterapkan oleh negara lain, penting bagi pemangku kepentingan untuk mengkaji dan memberlakukan kebijakan tegas terkait MBDK di Indonesia.

Kata kunci: Pelindungan Konsumen, MBDK, PTM, Diabetes Melitus

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2019, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Perdata Di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

***LEGAL PROTECTION FOR SUGAR SWEETENED BEVERAGES (SSBs)
CONSUMPTION WHICH POTENTIALLY INCREASE THE PREVALENCE OF
NONCOMMUNICABLE DISEASE: DIABETES MELITUS IN SPECIAL
REGION OF YOGYAKARTA (DIY)***

ABSTRACT

Tasya Amanda³ and Nailul Amany⁴

This legal research aims to find out and examine the legal protection for SSBs consumption which potentially increase the prevalence of noncommunicable disease: diabetes melitus in DIY. This research also aims to examine the role of the related stakeholders on decreasing the prevalence of noncommunicable diseases, particularly diabetes melitus related to sugar sweetened beverages (SSBs) consumption, in DIY.

This legal research is a normative-empirical and analytical-descriptive research. This research conducted literature review with primary, secondary and tertiary legal resources. Field research was conducted using in-depth interviews with opened interview guidelines and also conducted an online survey using Google Form shared on social media. Collected data was analyzed descriptively.

*Based on the result of this legal research, this study concluded that: **first**, legal protection for SSBs consumption is not yet being regulated under current law. In the recent situation, preventive and repressive legal protection for SSBs consumption just refers to the refined food regulations implicitly. However, the legal protection for SSBs consumers is not required from the basic principle of the legal protection regulator. The regulation of SSBs is the government obligation to exist based on the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 and Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan. **Second**, the effort to decrease the noncommunicable diseases prevalence, particularly diabetes melitus, is not yet optimum, especially in DIY. The government's effort to decrease the diabetes melitus prevalence in DIY could be seen through Gerakan Masyarakat (GERMAS) "Gendhis Manis" and "CERDIK". Finally, the present study underlined that significant and forceful regulation regarding SSBs consumption is needed.*

Keywords: Consumers Legal Protection, Sugar Sweet Beverages (SSBs), Noncommunicable Disease, Diabetes Melitus

³ Undergraduate Law Student of Civil Law, Bachelor Degree Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Batch 2019, Sleman, Special Region of Yogyakarta.

⁴ Lecturer Of Civil Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Special Region of Yogyakarta.